MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PRINSIP SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM

Maulia Azzahra, Amanda Alfina Damayanti, Elvin Bagas Sugara
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Jl. Raya Bogor Km.23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830
mauliazzahra18@gmail.com[1] mandaaalfinaa@gmail.com[2]
elvinoses58@gmail.com[3]

ABSTRACT

Islamic economics is distinct from both capitalism and socialism; the two do not constitute a hybrid. Rather than seeing man as the focal point (anthropocentrism), the Islamic economic system views him as an obedient servant of Allah (âbid) who must obey His orders as earthly ruler. In light of the demands of religious teachings, economic operations should promote personal and societal well-being by preserving the values of ownership, fairness, freedom, balance, fraternity, and unity.

Keywords: *Islamic Economics, Tawhid, Justice, Maslahah, Caliphate*

ABSTRAK

Ekonomi Islam berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme; keduanya bukan merupakan gabungan. Alih-alih melihat manusia sebagai titik fokus (antroposentrisme), sistem ekonomi Islam memandang manusia sebagai hamba Allah yang taat (âbid) yang harus mematuhi perintah-Nya sebagai khalifah di muka bumi. Mengingat tuntutan ajaran agama, operasi ekonomi harus mempromosikan kesejahteraan pribadi dan masyarakat dengan melestarikan nilai-nilai kepemilikan, keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, dan persatuan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Tauhid, Keadilan, Maslahah, Khalifah

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi selalu menjadi perhatian utama setiap negara karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mencari cara

terbaik dalam mengatur kegiatan ekonomi telah melahirkan berbagai pendekatan dan sistem yang berbeda di berbagai belahan dunia. Perbedaan tersebut biasanya muncul karena pandangan setiap bangsa mengenai peran pemerintah, bentuk kepemilikan sumber daya, serta cara memanfaatkan potensi manusia dan alam yang dimiliki.

Ekonomi Islam berkembang sebagai sistem yang menempatkan nilai spiritual dan moral di samping tujuan material. Selain mengendalikan sistem produksi dan pasar, sistem ini juga mengarahkan tindakan manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kegiatan ekonomi dipandang oleh umat Islam sebagai aspek integral dari khalifah (tugas) manusia di muka bumi, dan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan (keuntungan).

Prinsip utama dalam ekonomi Islam berpijak pada dua hal: nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nilai ketuhanan menuntun manusia agar berpegang pada ajaran Ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi, sedangkan nilai kemanusiaan mengarahkan tujuan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan memadukan keduanya, sistem ini berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Keimanan menjadi faktor penting dalam membentuk cara seseorang bertindak dalam ekonomi. Iman membuat seseorang berhati-hati dalam mencari rezeki, mempertimbangkan kehalalan sumber pendapatan, serta memperhatikan keadilan dalam distribusi. Pandangan ini menempatkan moral sebagai pengendali agar kegiatan ekonomi tidak keluar dari nilai kemaslahatan. Melalui iman, seseorang belajar menyeimbangkan kebutuhan jasmani dengan tanggung jawab sosial.

Dalam ekonomi Islam, manusia dianggap sebagai unsur utama dalam pembangunan ekonomi. Kekayaan alam, teknologi, dan modal tidak akan memberi manfaat tanpa peran aktif manusia yang beriman dan berilmu. Oleh sebab itu, pengelolaan ekonomi dalam Islam selalu menekankan tanggung jawab moral, etika kerja, dan semangat berbagi.

Rujukan ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an serta Sunnah, memberikan dasar yang jelas bagi kegiatan ekonomi. Kedua sumber tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama melalui berbagai metode seperti ijtihad dan kajian fiqih. Prinsip dasarnya adalah bahwa semua sumber daya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus digunakan secara bijak untuk kepentingan bersama. Islam juga mengakui hak milik pribadi, tetapi melarang pemanfaatan harta dengan cara yang menimbulkan ketidakadilan atau merugikan orang lain.

Dengan landasan tersebut, ekonomi Islam bukan hanya berorientasi pada suatu hasil akhir, akan tetapi juga pada tahapan yang dijalani. Setiap kegiatan ekonomi dipandang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat baik dan cara yang

benar. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan yang adil, merata, dan penuh keberkahan bagi seluruh umat manusia.

KONSEP TEORI

PRINSIP SISTEM EKONOMI DALAM ISLAM

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan dari sistem konvensional karena berlandaskan tauhid dan nilai ibadah. Setiap kegiatan ekonomi diarahkan untuk mencapai maslahah, keadilan sosial, dan keberkahan, bukan sekadar keuntungan materi. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di dunia dan akhirat.

NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM EKONOMI ISLAM

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1. Tauhid.

Tauhid menjadi landasan utama sistem ekonomi Islam. Semua aktivitas ekonomi, seperti bekerja, berdagang, atau berinvestasi, harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tujuan akhirnya bukan semata mencari keuntungan, tetapi mendapatkan ridha Allah.
(QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 56)

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."

2. Maslahah dan Falah.

Maksud utama syariah Islam adalah menciptakan kemaslahatan umat dan mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Maslahah mencakup segala hal yang membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari kerusakan (mafsadah). Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam Islam harus mengandung manfaat dan menjauhkan mudharat.

3. Khalifah.

Manusia ditugaskan Allah sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan memakmurkan alam sesuai dengan hukum Allah SWT. Sebagai khalifah, manusia memiliki kebebasan berpikir dan bertindak, tetapi tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya.
(QS. Al-An'ām [6]: 165)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain."
(QS. Al-Insān [76]: 3)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

"Sesungguhnya Kami telah menunjukkan jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir."

Manusia bebas memilih, namun kebebasan itu selalu diiringi tanggung jawab dunia dan akhirat.

4. Al-Amwāl – Harta

Dalam Islam, Allah adalah pemilik sejati harta, sementara manusia hanya penerima amanah (mustakhlaf). Kepemilikan harta bersifat relatif dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menekankan kepemilikan absolut, Islam memandang harta sebagai sarana ibadah dan kesejahteraan bersama.

5. Al-'Adl – Keadilan

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek, termasuk ekonomi. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menzalimi, dan tidak mengambil hak orang lain. Sistem ekonomi Islam menolak ketimpangan dan menegakkan keseimbangan sosial.

6. Ukhuwah – Persaudaraan

Islam menanamkan nilai ukhuwah atau persaudaraan antar sesama manusia, khususnya sesama muslim. Prinsip ini mendorong saling tolong-menolong dan kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

(QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati."

7. Akhlak – Etika

Akhlak ialah inti dari ajaran Islam dan menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap muslim dituntut untuk jujur, amanah, adil, dan ihsan dalam bekerja maupun berdagang. Perilaku yang beretika menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga ibadah.

8. Ulil Amri – Pemerintah

Pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab agar menegakkan syariat Allah serta mengatur perekonomian agar adil dan sejahtera. Masyarakat wajib taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

(QS. An-Nisā' [4]: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu."

Negara juga wajib menjamin kebutuhan hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial ekonomi.

9. Al-Ḥurriyyah wa al-Mas'ūliyyah – Kebebasan dan Tanggung Jawab

Islam mengakui kebebasan individu dalam berusaha, namun kebebasan itu tidak mutlak. Setiap kebebasan harus disertai tanggung jawab (mas'ūliyyah) dan sesuai dengan syariah. Manusia bebas mengelola alam sebagai khalifah,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

namun hasil dan tindakannya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat (hisab).

10. Berjamaah – Kerjasama dan Sinergi

Ekonomi Islam sangat menekankan pada kerja sama. Bekerja secara berjamaah akan menghasilkan lebih banyak pahala dan berkah daripada bekerja sendiri, menurut Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang melapangkan kesulitan dunia bagi seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat."

(HR. Muslim & Tirmidzi)

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan strategi literatur (library research)berlandaskan penelitian deskriptif kualitatif. Sistem ekonomi Islam akan menjadi subjek investigasi lebih lanjut. Guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem ekonomi Islam, pendekatan ini mengumpulkan serta menganalisa data dari berbagai materi cetak, termasuk buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait.

HASIL PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

Mengacu keyakinan Islam, sistem ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi eksistensi manusia. Terdapat keselarasan antara kepentingan material dan kepentingan abadi, antara kebebasan pribadi dan kewajiban kolektif. Sistem ini menuntun manusia untuk mengelola sumber daya dengan adil dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai spiritual. Prinsip-prinsip dasar berikut menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1. Keyakinan sebagai Landasan Ekonomi

Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus berakar pada keyakinan kepada Allah SWT. Prinsip tauhid menegaskan bahwa manusia hanya sebagai pengelola dan bukan pemilik mutlak harta. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi—seperti bekerja, berdagang, dan berinvestasi—dipandang sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai aturan syariat. Tujuan utamanya tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, melainkan juga mendapatkan ridha Allah

2. Kepemilikan Dengan Prinsip Berkeadilan

Islam mengakui hak individu dalam memiliki dan mengelola kekayaan, namun kepemilikan itu bersifat amanah. Artinya, harta yang dimiliki tidak boleh digunakan secara berlebihan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip ini membedakan ekonomi Islam dari sosialisme, yang melarang kepemilikan pribadi, dan kapitalisme, yang mempromosikan kebebasan

individu tanpa batas. Islam menempatkan kepemilikan dalam bingkai keadilan sosial untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

3. Kebebasan yang Dibatasi Syariat

Islam memberikan ruang kebebasan kepada setiap individu untuk berusaha, berdagang, dan mengembangkan potensi ekonomi. Namun kebebasan tersebut memiliki batasan yang diatur oleh hukum syariat. Manusia bebas melakukan transaksi selama tidak melanggar nilai halal dan haram, serta tidak menzalimi pihak lain. Negara berhak melakukan pengawasan atau intervensi jika aktivitas ekonomi menimbulkan ketimpangan atau merugikan masyarakat.

4. Keadilan Sebagai Prinsip Utama

Keadilan merupakan nilai sentral dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip ini menghendaki agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional tanpa mengurangi hak orang lain. Keadilan dalam Islam tidak hanya diukur dari kesepakatan sosial, tetapi bersumber dari ketentuan Allah SWT. Melalui penerapan prinsip ini, distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi diharapkan berlangsung secara seimbang sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam.

5. Keseimbangan dalam Kehidupan Ekonomi

Konsep keseimbangan (al-tawazun) menuntun umat Islam untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan juga mencakup hubungan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan ekonomi. Islam menolak sifat konsumtif berlebihan dan mengajarkan moderasi dalam mengelola harta. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak semata diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.

6. Ukhuwah Islamiyah

Prinsip ukhuwah menjadi dasar bagi terbentuknya kerja sama dan solidaritas dalam aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah agama, Islam mengajarkan para pemeluknya untuk bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Nilai kebersamaan ini menjadi pembeda dengan sistem kapitalis yang cenderung individualistik maupun sosialisme yang mengabaikan kebebasan pribadi. Dengan menumbuhkan rasa persaudaraan, Islam membangun tatanan ekonomi yang harmonis dan inklusif.

7. Distribusi Kekayaan dan Larangan Penimbunan Harta.

Sejumlah kecil orang yang mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar ditolak oleh Islam. Untuk memastikan pemerataan, Islam menerapkan mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan. Melalui instrumen tersebut, perputaran harta dapat terjadi secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Larangan menimbun kekayaan ini menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pengaruh Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam terhadap Pembangunan Ekonomi

Pendekatan ekonomi dalam Islam memberikan pandangan menyeluruh untuk menjawab berbagai tantangan global, termasuk ketimpangan sosial serta krisis keuangan. Sistem ini menyeimbangkan unsur spiritual dan kebutuhan materi, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara beretika dan ramah lingkungan.
Melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, harta dialirkan secara proporsional agar tidak menumpuk pada segelintir pihak. Nilai keadilan dan semangat kebersamaan yang menjadi landasannya memperkuat rasa solidaritas dan stabilitas di tengah masyarakat.
Dengan karakter tersebut, ekonomi Islam muncul sebagai model alternatif yang dapat diadaptasi di berbagai negara untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi, merata, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Peran Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Kerangka Ekonomi Kapitalis dan Kerangka Ekonomi Sosialis

Konvergensi diamati dalam berbagai dimensi, termasuk pengakuan kebebasan individu dan penekanan pada dekriminalisasi kegiatan ekonomi; paradigma Islam memberikan keseimbangan yang lebih holistik yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang tidak ada dalam kedua sistem.

1. Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis

   Kapitalisme mengedepankan kebebasan pribadi, hak kepemilikan pribadi, hak untuk memiliki aset, serta pentingnya mekanisme pasar sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Ketidaksetaraan sosial, penggunaan sumber daya yang tidak merata, dan konsumerisme yang berlebihan ialah hasil umum dari sistem ini. Di sini, ajaran ekonomi Islam bertentangan dengan kelemahan kapitalisme. Meskipun Islam menjunjung tinggi kebebasan pribadi serta hak milik, Islam membatasi hak-hak tersebut sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh moralitas dan hukum syariah (Ahkam al-Syariah). Uang ialah anugerah dari Tuhan yang harus ditangani dengan keadilan sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaatnya. Dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara hak milik pribadi dan kesejahteraan kolektif, Islam melarang riba dan pengumpulan kekayaan yang tidak sehat serta mewajibkan pembayaran zakat.

2. Dalam Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialisme mengutamakan kesetaraan dan solidaritas dengan cara menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mengendalikan sepenuhnya kegiatan ekonomi oleh pemerintah. Sasarannya ialah guna

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mengurangi ketidaksetaraan, tetapi dalam prosesnya, kebebasan masyarakat sering kali dirampas dan lebih banyak kontrol yang ditetapkan, yang dapat menyebabkan ketidakadilan baru. Dengan menjunjung tinggi kebebasan untuk mempunyai harta pribadi dan menekankan kewajiban sosial melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, dan infak, konsep ekonomi Islam memberikan sebuah kompromi. Distribusi kekayaan yang lebih adil dapat dicapai dengan cara ini tanpa melanggar hak siapa pun untuk mempunyai harta. Untuk menjaga kebebasan individu dan keadilan sosial, ekonomi Islam berpendapat bahwa negara hanya boleh bertindak sebagai fasilitator dan pengawas, dan bukan sebagai pemilik properti pribadi.

3. Keseimbangan antara Kapitalisme dan Sosialisme

Dengan menyatukan prinsip-prinsip kebebasan pribadi dan akuntabilitas kolektif, ekonomi Islam berada di jalan tengah antara sosialisme dan kapitalisme. Ekonomi Islam menghindari jangkauan sosialisme yang melampaui batas dan eksploitasi kapitalisme serta individualisme radikal. Efisiensi ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil adalah dua pilar yang menjadi dasar ekonomi Islam, seperti halnya keseimbangan antara kepentingan ukhrawi (duniawi) dan tanggung jawab ukhrawi (sosial). Jadi, ekonomi Islam bukan hanya sesuatu yang harus dipikirkan oleh umat Islam, ekonomi Islam ialah alternatif yang dapat membantu mengatasi masalah ekonomi dalam skala dunia. Dengan pendekatannya yang lebih komprehensif dan adil, gagasan-gagasannya dapat melengkapi, memperbaiki, dan bahkan menyelesaikan kekurangan sistem ekonomi tradisional.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam memberikan cara pandang menyeluruh dalam memahami dan mengatasi persoalan ekonomi modern. Prinsip-prinsip ketuhanan mendasari pendekatan ini, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian sosial dan individu dengan menyeimbangkan kebutuhan material serta spiritual. Pembangunan kemakmuran bersama jangka panjang bertumpu pada prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas sambil menjalankan kebebasan, berbagi makanan secara adil, dan rasa kebersamaan.

Menurut pandangan saya, posisi ekonomi Islam berada di titik tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Ia tidak menolak unsur positif dari keduanya, tetapi menyempurnakannya dengan nilai moral dan tujuan sosial agar pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, melainkan membawa manfaat bagi semua.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DAFTAR PUSTAKA

Data Direktorat Bank Syari'ah Bank Indonesia, Harian Republika, 6 Januari 2004

Data Bank Indonesia, Harian Republika, 19 Januari 2004

Dawam Rahardjo, Muhammad, Pengantar buku Bank Syari'ah Analistis Fikih dan Keuangan, IIIT, Jakarta, 2003

Didin Damanhuri, Ekonomi Berbasis Hutang, Republika, 27 Desember 2002

Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi. 1990. "Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers." The International Journal of Bank Marketing. 8 (4).

Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid I, Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah – Cet 2 ed.

Esid, Yassine. 1995. A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought. Leiden: E.J. Brill.

Eldine, Achyar, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah, www.uika.bogor.ac.id

El-Asker, A.A.F. 1987. The Islamic Business Enterprise, Croom Helm, London.

El-Din, A.K. 1986. "Ten years of Islamic banking." Journal of Islamic Banking and Finance, July–September, 3(3):49–66.

***Faridi,Faridi, F. R., 1980, "Zakat and Fiscal Policy", dalam Khurshid Ahmad (ed.), Studies in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation/Jeddah: ICRIE*

Fatmawati, Eli, 2004, "Peranan Zakat terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan"

Firmansyah, 2006, "Pengaruh BMT terhadap Perkembangan Usaha Nasabah", dalam M. Nadjib, Pengaruh BMT terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Fuad Mohd Fachruddin. 1983. Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi. Bandung: Alma'arif.

Gregory, Paul R. dan Robert C. Stuart. 1999. Comparative Economic System. Boston: Houghton Mifflin Company.

Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997. "Islamic Banking: a Study in Singapore." The International Journal of Bank Marketing. 15 (6)

Galbraith, J.K dan Darity, William. 1994. Macroeconomics. Boston: Houghton Mifflin Co

Gamal, Merza. Ekonomi Keseimbangan.

www.penulislepas.com/v2/?p=52 – 31k – 11 Sep 2006Data Direktorat Bank Syari'ah Bank Indonesia, Harian Republika, 6 Januari 2004

Data Bank Indonesia, Harian Republika, 19 Januari 2004

Dawam Rahardjo, Muhammad, Pengantar buku Bank Syari'ah Analistis Fikih dan Keuangan, IIIT, Jakarta, 2003

Didin Damanhuri, Ekonomi Berbasis Hutang, Republika, 27 Desember 2002

Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi. 1990. "Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers." The International Journal of Bank Marketing. 8 (4).

Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid I, Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah – Cet 2 ed.

Esid, Yassine. 1995. A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought. Leiden: E.J. Brill.

Eldine, Achyar, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah, www.uika.bogor.ac.id

El-Asker, A.A.F. 1987. The Islamic Business Enterprise, Croom Helm, London.

El-Din, A.K. 1986. "Ten years of Islamic banking." Journal of Islamic Banking and Finance, July–September, 3(3):49–66.

***Faridi,Faridi, F. R., 1980, "Zakat and Fiscal Policy", dalam Khurshid Ahmad (ed.), Studies in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation/Jeddah: ICRIE*

Fatmawati, Eli, 2004, "Peranan Zakat terhadap Pemberdayaan dan Kesejahteraan"

Firmansyah, 2006, "Pengaruh BMT terhadap Perkembangan Usaha Nasabah", dalam M. Nadjib, Pengaruh BMT terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Fuad Mohd Fachruddin. 1983. Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi. Bandung: Alma'arif.

Gregory, Paul R. dan Robert C. Stuart. 1999. Comparative Economic System. Boston: Houghton Mifflin Company.

Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997. "Islamic Banking: a Study in Singapore." The International Journal of Bank Marketing. 15 (6).

Galbraith, J.K dan Darity, William. 1994. Macroeconomics. Boston: Houghton Mifflin Co.

Gamal, Merza. Ekonomi Keseimbangan.

www.penulislepas.com/v2/?p=52 – 31k – 11 Sep 2006